

ABSTRAK

Terjadinya kembali kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang mengakibatkan polusi asap lintas batas menyebabkan Singapura frustrasi, sehingga mendorong pemerintah Singapura untuk membentuk suatu aturan yang memuat yurisdiksi ekstrateritorial di dalamnya. Aturan tersebut kemudian dikenal dengan *Transboundary Haze Pollution Act*. 2014. Berdasarkan peraturan tersebut Singapura memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Sebagai bentuk implementasi dari THPA, pada tahun 2016 Singapura menangkap WNI terduga pelaku pembakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kompetensi Singapura dalam menangkap WNI terduga pelaku pembakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan polusi asap lintas batas negara ditinjau dari kaidah Hukum Internasional. Dimana penelitian ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif yang mengedepankan studi pustaka, yang dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pada dasarnya Indonesia dapat diminta tanggung jawab negara atas polusi asap lintas batas yang terjadi. Namun pada prakteknya tanggung jawab negara akan sukar untuk diminta, dikarenakan Indonesia telah meratifikasi AATHP. Adapun terkait kompetensi Singapura dalam menangkap WNI terduga pelaku pembakaran hutan, menurut Hukum Internasional Singapura tidak memiliki kompetensi, karena tindakan tersebut tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia sehingga perbuatan Singapura merupakan bentuk pelanggaran kedaulatan.

Kata Kunci: Polusi Asap Lintas Batas, Ratifikasi, Tanggung Jawab Negara, Implementasi THPA, Kedaulatan

ABSTRACT

The re-occurrence of haze pollution arising from forest and land fires in Indonesia made Singapore frustrate and led the Singapore government to form a rule that contained extraterritorial jurisdiction. This rule known as Transboundary Haze Pollution Act 2014 (THPA). Under this regulation, Singapore has jurisdiction and rights to prosecute perpetrators of forest and land's fires occurred in Indonesia. As implementation, in 2016 Singapore arrested the Indonesian citizen who allegedly burned the forest and land that occurred in 2015. This study is intended to determine Singapore's competency in arresting Indonesian citizens suspected of burning forest and land caused transboundary haze pollution in the perspective of International law. The research is conducted in normative juridical research methods. By using the qualitative methods, the result shows that basically Indonesia have to responsible on the issues of haze pollution. Because they have carried out omissions in the form of ineffective law enforcement against the alleged perpetrators of forest and land burning. But in practice state responsibility will be difficult to asked, because Indonesia has ratified ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution that reduction the responsibility itself. Furthermore, the research also proved that show that -according to the International Law- Singapore's does not have competence to arrest Indonesian citizens suspected of being perpetrators of forest fires, because of the issue of sovereignty of Indonesia the regulation-making never have admitted by Indonesian Government before. Likewise, the actions will be a violation of sovereignty

Key Word: Transboundary Haze Pollution, Ratification, State Responsibility, Implementation, Sovereignty